

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang terus berkembang dengan cepat telah mendorong pemerintah agar terus beradaptasi dalam upaya memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Dalam era digital ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas dan wewenangnya dapat dijalankan dengan baik, serta mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap publik. Upaya penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung terciptanya sistem kerja yang lebih terorganisir, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, teknologi informasi dikembangkan dengan cara menumbuhkan kapasitas sumber daya aparatur negara, serta penguatan infrastruktur dan tata kelola sistem informasi yang mendukung pelayanan publik yang prima. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu tentang penyusunan struktur organisasi yang dapat mengelola teknologi informasi dengan baik. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan mengimplementasikan sistem E-Government atau pemerintah elektronik. E-Government bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi pemerintah, seperti pengurusan dokumen, surat, dan arsip secara digital. Melalui sistem ini, proses administrasi yang selama ini terkesan rumit dan memakan waktu bisa diimplementasikan dengan lebih efisien dan mudah, tanpa mengurangi mutu pelayanan. Aspek yang sama pentingnya dalam administrasi pemerintahan adalah pengelolaan arsip. Arsip merupakan elemen krusial dalam sebuah organisasi pemerintah, karena berfungsi sebagai bukti administratif yang mendukung segala kegiatan operasional. Setiap kegiatan administrasi pasti menghasilkan arsip yang perlu disimpan dengan baik agar dapat diakses kembali saat diperlukan. Untuk itu, pengelolaan arsip yang efektif sangat

diperlukan untuk menjamin kemudahan akses informasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 memuat hal Kearsipan, pengelolaan arsip wajib dilakukan secara terstruktur, efektif, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan digunakan untuk mendukung kelancaran fungsi organisasi pemerintahan. Dalam konteks ini, pengelolaan arsip tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor administrasi, tetapi juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang lebih luas yang berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Pengelolaan arsip yang terstruktur dan terorganisir dengan baik juga mengurangi potensi kehilangan dokumen yang dapat menghambat operasional pemerintah. Dengan demikian, esensi pemerintah dapat terus memperbarui sistem pengelolaan arsip yang mengadopsi teknologi terkini, agar arsip dapat diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam menyediakan fasilitas yang berkualitas terhadap publik serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, turut berperan aktif dalam mengimplementasikan teknologi berbasis E-Government (Pemerintahan Elektronik) sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Langkah spesifik yang diperoleh adalah peningkatan aplikasi SiTaNDE (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik), yang bertujuan untuk memodernisasi dan mempercepat pengelolaan dokumen dan surat resmi dalam bentuk arsip. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Diskominfo Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk mengadopsi sistem digital yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Aplikasi SiTaNDE hadir sebagai solusi untuk meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi dan dapat diakses secara lebih cepat. Dengan SiTaNDE, semua dokumen dan surat yang diproses di instansi pemerintah dapat diakses dan dipantau secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada arsip fisik dan memastikan kemudahan dalam pelacakan surat yang sudah dikirim, baik kepada Bupati, Sekretaris Daerah, ataupun Asisten Sekretariat Daerah.

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi SiTaNDE adalah untuk menciptakan keterpaduan dalam mekanisme pengelolaan pemerintahan yang dilakukan menggunakan sistem jaringan informasi yang menghubungkan berbagai organisasi pemerintah. Melalui aplikasi ini, setiap pengguna, khususnya pegawai dan aparatur negara, dapat dengan mudah mengakses informasi terkait tindak lanjut surat yang telah dikirim, tanpa perlu datang langsung ke kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah. Cukup dengan membuka aplikasi, pengguna dapat mengetahui status surat yang mereka kirimkan, sehingga mempercepat alur administrasi dan menghemat waktu yang berharga. Aplikasi SiTaNDE ini juga bertujuan untuk mendukung salah satu sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan bertujuan mengembangkan aplikasi persuratan kedinasan yang lebih efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan aplikasi ini proses pelacakan dokumen menjadi lebih praktis, dan pengguna tidak perlu lagi menunggu lama atau bolak-balik ke kantor untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan surat. Semua informasi yang dibutuhkan kini tersedia secara real-time dalam genggaman tangan, menjadikan pekerjaan lebih efisien dan proses administrasi lebih cepat.

Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap transformasi E-Government, yang kini menjadi salah satu langkah maju dari pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menciptakan layanan birokrasi lebih berkualitas dan mengutamakan layanan masyarakat. Dengan adanya SiTaNDE, diharapkan berbagai permasalahan administratif yang ada, seperti pemalsuan dokumen, pemborosan kertas, serta waktu dan biaya yang tinggi, dapat teratasi. Diskominfo Kabupaten Bangkalan, melalui aplikasi SiTaNDE, memberikan inovasi yang sangat penting dalam menyusun dokumen dan surat yang berbentuk arsip secara lebih terorganisir dan terjaga keasliannya. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan, tetapi juga mempercepat proses administrasi yang selama ini memakan waktu lama. Semua ini merupakan upaya nyata dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan ramah terhadap pengguna, serta mendukung tercapainya Good Governance yang semakin berfokus pada kemudahan akses informasi dan pelayanan publik yang optimal.

Pengelolaan surat biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang mudah, padahal dalam kenyataannya memerlukan perencanaan dan pengawasan yang sangat cermat. Aktivitas pengelolaan surat dan dokumen adalah bagian yang sangat penting dalam administrasi pemerintahan. Setiap kesalahan, sekecil apapun, dapat berdampak pada penurunan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen dan surat. Salah satu faktor yang membuat pengelolaan surat ini rentan terhadap kesalahan adalah volume surat yang terus meningkat, serta kompleksitas proses yang melibatkan berbagai pihak dengan standar dan prosedur yang ketat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sejalan dengan inovasi teknologi terkini, banyak instansi pemerintahan yang masih kesulitan untuk memaksimalkan potensi teknologi guna mendukung efisiensi administrasi persuratan. Padahal, teknologi informasi bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan surat dan dokumen, serta meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada proses manual.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem digital, seperti aplikasi e-Government, menawarkan peluang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi. Dalam konteks ini, aplikasi SiTaNDE merupakan strategi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan surat dan dokumen di lingkungan pemerintahan. Melalui penerapan aplikasi ini, proses pengelolaan surat dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, dan transparan, sehingga meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat. Namun, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini benar-benar efektif, diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Penggunaan aplikasi SitaNDE dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, misalnya, harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, pelatihan bagi pengguna, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Semua elemen tersebut harus berjalan secara sinergis agar tujuan utama dari penerapan teknologi ini tercapai, yaitu peningkatan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan surat melalui aplikasi SiTaNDE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Penelitian

ini bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan aplikasi SiTaNDE dalam meningkatkan kualitas pengelolaan surat dan dokumen serta memberikan saran untuk perbaikan ke depannya..

Pengelolaan surat sering kali dianggap sebagai suatu hal yang sederhana, padahal dalam kenyataannya memerlukan perencanaan dan pengawasan yang sangat cermat. Aktivitas pengelolaan surat dan dokumen adalah bagian yang sangat penting dalam administrasi pemerintahan. Setiap kesalahan, sekecil apapun, dapat berdampak pada penurunan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen dan surat. Salah satu faktor yang membuat pengelolaan surat ini rentan terhadap kesalahan adalah volume surat yang terus meningkat, serta kompleksitas proses yang melibatkan berbagai pihak dengan standar dan prosedur yang ketat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak instansi pemerintahan yang masih kesulitan untuk memaksimalkan potensi teknologi guna mendukung efisiensi administrasi persuratan. Padahal, teknologi informasi bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan surat dan dokumen, serta meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada proses manual.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem digital, seperti aplikasi e-Government, menawarkan peluang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi. Dalam konteks ini, aplikasi Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (SiTaNDE) dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pengelolaan surat dan dokumen di lingkungan pemerintahan. Melalui penerapan aplikasi ini, proses pengelolaan surat dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, dan transparan, sehingga meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat. Namun, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini benar-benar efektif, diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Penggunaan aplikasi SiTaNDE dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, misalnya, harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, pelatihan bagi pengguna, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Semua elemen tersebut harus berjalan secara sinergis agar tujuan utama dari penerapan teknologi ini tercapai, yaitu peningkatan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan surat melalui aplikasi SiTaNDE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan aplikasi SiTaNDE dalam meningkatkan kualitas pengelolaan surat dan dokumen serta memberikan saran untuk perbaikan ke depannya.

B. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan E-Government Melalui Penggunaan Aplikasi SiTaNDE (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penggunaan Aplikasi SiTaNDE (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan dari aplikasi SiTaNDE (Sistem Tata Naskah Dinas) dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penggunaan aplikasi SiTaNDE (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dari penelitian ini adalah menerapkan salah satu kajian mata kuliah di Prodi Ilmu Pemerintahan yakni “Teknologi Informasi Pemerintahan” serta memberikan wawasan dan referensi terhadap peneliti lain di bidang keilmuan masing-masing.
2. Proses dan hasil penelitian ini tentunya mampu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem E-Government oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan aplikasi E-Government melalui aplikasi SiTande (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik). Dengan demikian, pemerintah mengupayakan terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, output dari penelitian ini difungsikan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkelanjutan dalam pengembangan E Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan

3. Dan, memberikan analisa dan saran terhadap efektifitas pengelolaan aplikasi Egovernment melalui aplikasi SiTande (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yang seharusnya dijalankan berdasarkan sesuai fungsi dari pada aplikasi tersebut.

E. Definisi Konseptual

Konseptualisasi pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan. Dengan adanya konsep yang jelas, peneliti dapat lebih mudah memahami dan menginterpretasikan berbagai konsep yang sesuai dengan studi ini. Parameter yang akan dijelaskan secara konseptual dalam penelitian ini meliputi;

1. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan keberhasilan suatu organisasi dengan program yang direncanakan. Sehingga dalam efektivitas e-Government dalam administrasi publik menjadi krusial dalam mengevaluasi pengaruh teknologi informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan modern. Dari segi efektivitas e-Government ini memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah dengan lebih mudah tentunya. Selain itu sumber daya manusia yang berkompeten dalam sebuah organisasi ini memberikan pengaruh terhadap efektivitas e-Government itu sendiri yang menentukan keberhasilan sesuatu program yang direncanakan pada sebuah teknologi digital tersebut.

2. E-Government

E-Government Merupakan salah satu aspek teknologi informasi yang berperan signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelayan publik. Sebagai respons terhadap perkembangan global teknologi informasi. Hal ini membuat Indonesia merespons hal tersebut untuk mengembangkan sistem digital yang mendukung juga pelaksanaan pemerintah di yang akan datang. Sebelumnya inpres Nomor 03 Tahun 2003 telah dikeluarkan untuk mengatur Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government Nasional, yang menggarisbawahi komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan

pelayanan publik responsif melalui penerapan E-Government. Melalui penerapannya, internet dapat dimanfaatkan sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta baiknya pelayanan publik yang tersedia dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Aspek teknologi, keamanan, dan regulasi menjamin pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dalam penyelenggaraan e-Government.

Revolusi industri 4.0 sebagai era pesat terlaksananya E-Government memberikan wujud nyata kemajuan teknologi. Implementasi E-Government ini merupakan transformasi dari sistem kerja manual di instansi pemerintah menjadi sistem elektronik, dengan mengembangkan sistem informasi yang selaras dengan data dan proses birokrasi yang ada. Dengan E-Government, pemerintah dapat memperoleh manfaat signifikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan publik mudah untuk diakses, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif sehingga good governance bisa diperoleh.

3. Aplikasi Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik

Verdy Yasin (2007) menyebutkan bahwa aplikasi merupakan jenis perangkat lunak yang secara langsung menggunakan teknologi komputer untuk membantu pengguna menyelesaikan pekerjaannya. Aplikasi ini berbeda dengan perangkat lunak sistem yang dapat berfungsi untuk menggabungkan kapasitas komputer tetapi tidak secara langsung berfungsi menyelesaikan tugas secara detail. Anisyah (2000:30) juga memiliki pendapat yang sama dari definisi tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai keinginan pengguna. Aplikasi SiTaNDE adalah pengelolaan naskah dinas digital dengan mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi agar efektif dan efisien dalam pengambilan putusan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel secara konkret. Dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai cara dan tindakan menjalankan aplikasi di instansi terkait apakah sudah berjalan dengan baik atau memiliki faktor kendala. Berdasarkan

permasalahan tersebut, penulis ingin mengukur tolak keberhasilan permasalahan tersebut dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan yang dikutip dalam Richard M. Steers yaitu menjelaskan bahwa ukuran efektivitas yaitu Pencapaian Target Integrasi, Adaptas. Tujuan tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan e-government dalam penggunaan aplikasi SiTANDE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, pendekatan kualitatif dilakukan dalam penelitian ini yang dimana bertujuan secara menyeluruh (holistik) berdasarkan pengalaman subjek penelitian. Pemahaman tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa, dengan memperhatikan konteks alami serta menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dapat menjelaskan dengan detail objek penelitian serta menganalisis fenomena sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada Efektivitas Pengelolaan E-Government melalui penggunaan aplikasi SiTANDE. Penelitian kualitatif deskriptif berfungsi untuk menjelaskan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi yang ada. Penelitian kualitatif sendiri menitikberatkan pada pengungkapan realitas sosial di masyarakat, menggali ciri, karakter, sifat, serta gambaran fenomena tertentu (Bungin, 2010). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data yang akurat terkait fenomena komunikasi pemasaran.

Metode kualitatif meliputi berbagai metode pengumpulan data seperti observasi partisipatif, penelitian langsung dan wawancara secara detail (Bungin, 2010). Metode ini meneliti objek secara alami, berbeda halnya dengan metode eksperimen, instrumen utama dalam pengumpulan data ialah peneliti. Teknik yang sering digunakan meliputi wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif dengan penekanan pada makna yang terkandung, bukan pada generalisasi hasil penelitian (Sugiyono, 2009 Data

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari objek dan subjek penelitian, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya adalah hasil wawancara dengan pihak Sekretariat Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah tersusun rapi atau tersedia sebelumnya. Data ini dapat diakses melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, seperti dokumen resmi, berita, jurnal, buku, dan sumber terkait lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses peninjauan dan pendataan secara sistematis terhadap objek yang diamati, yaitu pengamatan langsung melalui kunjungan lapangan untuk memahami secara nyata fenomena atau jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi sebagai metode pengumpulan data untuk menilai efektivitas pengelolaan egovernment melalui penggunaan aplikasi SiTaNDE (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

b. Wawancara

Wawancara suatu bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana peneliti dan responden bertemu langsung secara tatap muka untuk mengumpulkan informasi secara verbal. Tujuan utama metode ini adalah memperoleh data yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Wawancara melibatkan dua orang atau lebih dengan pertanyaan yang berhubungan dengan situasi yang diambil. Dalam penelitiannya, Susan Stainback (1988 dalam Sugiyono) mengatakan bahwa peneliti dalam berwawancara memungkinkan mendapat pemahaman secara mendetail bagaimana partisipan mampu menjelaskan fenomena dan situasi, yang tidak bisa diperoleh dengan mengandalkan observasi saja.

Pelaksanaan wawancara idealnya dimulai dengan pertanyaan yang sederhana dan fokus pada informasi faktual, menghindari pertanyaan yang kompleks, serta menjauhkan dari pertanyaan pribadi. Peneliti juga dianjurkan untuk mengulang jawaban responden untuk memastikan kejelasan dan menjaga suasana komunikasi yang positif agar wawancara berjalan dengan lancarektif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen atau arsip dari informasi yang pasti terjamin keasliannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa arsip, foto, video, serta jurnal penelitian terkait dengan bahasan yang sedang ditinjau. Dokumentasi yang dibutuhkan antara lain adalah jurnal-jurnal yang relevan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan.

c. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan orang yang memiliki sumber pengetahuan dan informasi terkait dengan keadaan yang akan diteliti sekaligus menjadi narasumber untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini diantaranya, yaitu ;

- 1) Ketua Dinas Komunikasi Dan Informatikan
- 2) Kepala Bidang Aplikasi Informatika
- 3) Subkor Pengembangan Egovernment
- 4) Seketariat Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bangkalan

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah titik tempat seluruh kegiatan penelitian berlangsung dengan tujuan mengumpulkan data bahan serta data yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 35, Bangkalan 69116.

e. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses olah data yang telah disimpan dan dianalisis selama pelaksanaan penelitian, baik berupa informasi verbal maupun data numerik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini, akan diterapkan beberapa tahap dalam metode deskriptif kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang terkumpul diringkas dan difokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan proses ini berdasarkan pertanyaan penelitian agar dapat menjawab fokus pembahasan.

2. Penyajian Data

Penyederhanaan data kemudian disajikan secara ringkas berbentuk narasi teks dan juga dapat dilengkapi dengan grafik untuk mempermudah pemahaman.

3. Penyimpulan Data

Setelah data dikumpulkan dan diperiksa keabsahannya, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan fakta dan data yang ada, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya.

